



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/114 TAHUN 2023
TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Bupati Blora Nomor 900/4165 tanggal 25 September 2023;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 2 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora

Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Blora bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Blora dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Blora Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Blora, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Blora wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Bupati Blora;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA
Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/114 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BLORA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLORA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kabupaten Blora telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 21 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 26 September 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Blora dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.356.806.209.000,00	2.356.806.209.000,00	2.367.862.209.000,00
2.	Belanja Daerah	2.402.761.986.733,00	2.402.761.986.733,00	2.413.817.986.733,00
3.	Surplus/Defisit	(45.955.777.733,00)	(45.955.777.733,00)	(45.955.777.733,00)
4.	Pembiayaan Netto	45.955.777.733,00	45.955.777.733,00	45.955.777.733,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Blora atas kebijakan pengalokasian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahapan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS yang dilaksanakan dengan memegang prinsip konsistensi perencanaan dan penganggaran. Namun demikian, untuk tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada komponen Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah, belum konsisten apabila disandingkan dengan komponen Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah pada dokumen Perubahan KUA-PPAS. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Blora agar tetap menjaga kesesuaian penganggaran baik pada dokumen perencanaan maupun dokumen penganggaran.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp24.183.150.000,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp26.833.150.000,00.

b. Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp15.384.815.000,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp18.730.140.000,00.

c. Dinas Perumahan Pemukiman Dan Perhubungan

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp7.472.500.000,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp10.022.500.000,00.

d. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp8.433.853.700,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp7.844.603.700,00.

e. Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan

Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp509.666.260,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp1.199.096.260,00.

f. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata

Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan pada Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp12.335.000.000,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp14.300.000.000,00.

g. Sekretariat Dewan

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp353.650.000,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp74.155.000,00;

2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp116.900.000,00 namun pada Perubahan APBD menjadi tidak dianggarkan;

3) Sub Kegiatan Pembahasan APBD pada Kegiatan Pembahasan APBD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp99.950.000,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp2.957.428.000,00; dan

4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD pada Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp19.316.410.000,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp24.260.894.000,00.

h. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

1) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp415.050.113.000,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp424.795.113.000,00; dan

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp8.908.895.863,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp2.000.000.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi:

- a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- b. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Blora agar menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp2.280.183.806.000,00 bertambah Rp87.678.403.000,00 menjadi Rp2.367.862.209.000,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp305.310.862.000,00 bertambah Rp21.243.524.000,00 menjadi Rp326.554.386.000,00 atau 13,79% dari total pendapatan daerah; dan
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.974.872.944.000,00 bertambah Rp66.434.879.000,00 menjadi Rp2.041.307.823.000,00 atau 86,21% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Blora terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 86,21% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 13,79% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Blora dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Blora; dan

c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.844.195.960.000,00 bertambah Rp29.489.879.000,00 menjadi Rp1.873.685.839.000,00; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp130.676.984.000,00 bertambah Rp36.945.000.000,00 menjadi Rp167.621.984.000,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp546.138.051.978,00 bertambah Rp8.532.182.891,00 menjadi Rp554.670.234.869,00 atau menurun sebesar 1,56% yang dialokasikan untuk:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp407.492.780.841,00 bertambah Rp14.728.237.820,00 menjadi Rp422.221.018.661,00 atau meningkat 3,61%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp36.007.427.891,00 berkurang Rp82.795.731,00 menjadi Rp35.924.632.160,00 atau menurun 0,23%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp7.482.403.400,00 berkurang Rp625.210.811,00 menjadi Rp6.857.192.589,00 atau menurun 8,36%;

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp32.284.224.900,00 bertambah Rp357.669.074,00 menjadi Rp32.641.893.974,00 atau meningkat 1,11%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp4.698.516.900,00 berkurang Rp775.220.699,00 menjadi Rp3.923.296.201,00 atau menurun 16,50%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp21.022.746.908,00 bertambah Rp1.557.786.673,00 menjadi Rp22.580.533.581,00 atau meningkat 7,41%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp816.759.573,00 berkurang Rp896.306,00 menjadi Rp815.863.267,00 atau menurun 0,11%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp54.082.403,00 bertambah Rp57.126.781,00 menjadi Rp111.209.184,00 atau meningkat 105,63%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp29.440.289.691,00 berkurang Rp5.554.895.733,00 menjadi Rp23.885.393.958,00 atau menurun 18,13%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.230.734.384,00 berkurang Rp179.823.535,00 menjadi Rp1.050.910.849,00 atau menurun 14,61%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp3.052.511.085,00 berkurang Rp297.839.702,00 menjadi Rp2.754.671.383,00 atau menurun 9,76%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.555.574.002,00 berkurang Rp651.954.940,00 menjadi Rp1.903.619.062,00 atau menurun 25,51%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat penurunan belanja pada Objek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp124.218.450.160,00 menurun Rp5.700.751.000,00 menjadi Rp118.517.699.160,00. Namun demikian, terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Blora antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp27.009.325.000,00 berkurang Rp3.961.831.000,00 menjadi Rp23.047.494.000,00;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, semula dianggarkan sebesar Rp10.724.655.000,00 berkurang Rp22.442.716,00 menjadi Rp10.702.212.284,00;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, semula dianggarkan sebesar Rp3.848.201.500,00 bertambah Rp651.772.000,00 menjadi Rp4.499.973.500,00;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, semula dianggarkan sebesar Rp1.913.400.000,00 berkurang Rp25.200.000,00 menjadi Rp1.888.200.000,00;
 - e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, semula dianggarkan sebesar Rp207.000.000,00 berkurang Rp12.000.000,00 menjadi Rp195.000.000,00;

- f. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, semula dianggarkan sebesar Rp400.200.000,00 bertambah Rp245.350.000,00 menjadi Rp645.550.000,00;
- g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp9.851.480.000,00 bertambah Rp90.580.000,00 menjadi Rp9.942.060.000,00;
- h. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, semula dianggarkan sebesar Rp4.877.130.000,00 bertambah Rp74.705.000,00 menjadi Rp4.951.835.000,00; dan
- i. Belanja Jasa Tenaga Ahli semula dianggarkan sebesar Rp1.915.400.000,00 bertambah Rp828.150.000,00 menjadi Rp2.743.550.000,00.

Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. Segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Terdapat penambahan alokasi anggaran yang cukup signifikan yaitu pada kode rekening 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, semula dianggarkan sebesar Rp65.584.865.794,00 bertambah Rp16.763.116.956,00 menjadi Rp82.347.982.750,00 yang antara lain terdapat di Sekretariat Dewan pada Sub Kegiatan Pembahasan APBD, semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.554.049.000,00 dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, semula dianggarkan sebesar Rp14.452.200.000,00 bertambah Rp8.072.094.000,00 menjadi Rp22.524.294.000,00. Pemerintah Kabupaten Blora, dalam mengalokasikan anggaran khususnya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang harus dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan tentunya juga harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp3.494.850.000,00 bertambah Rp325.000.000,00 menjadi Rp3.819.850.000,00, yang antara lain diuraikan pada:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik, semula dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.250.000.000,00;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air, semula dianggarkan sebesar Rp670.000.000,00 berkurang Rp75.000.000,00 menjadi Rp595.000.000,00;
 - c. Belanja Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah, dianggarkan tetap sebesar Rp1.275.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan, semula dianggarkan sebesar Rp215.000.000,00 bertambah Rp160.000.000,00 menjadi Rp375.000.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Blora harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

6. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp78.911.362.000,00 bertambah Rp29.575.534.100,00 menjadi Rp108.486.896.100,00 atau 4,49% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat kenaikan alokasi anggaran diantaranya:
 - 1) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat, semula dianggarkan sebesar Rp12.245.000.000,00 bertambah Rp22.042.373.600,00 menjadi Rp34.287.373.600,00; dan
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, semula dianggarkan sebesar Rp49.380.330.000,00 bertambah Rp9.588.160.500,00 menjadi Rp58.968.490.500,00.Namun demikian terdapat pula alokasi belanja hibah yang mengalami penurunan, diantaranya:
 - 1) Belanja Hibah kepada BUMD, semula dianggarkan sebesar Rp2.552.500.000,00 berkurang Rp500.000.000,00 menjadi Rp2.052.500.000,00;

- 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, semula dianggarkan sebesar Rp480.000.000,00 berkurang Rp330.000.000,00 menjadi Rp150.000.000,00;
 - 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, semula dianggarkan sebesar Rp11.726.000.000,00 berkurang Rp725.000.000,00 menjadi Rp11.001.000.000,00; dan
 - 4) Belanja Hibah kepada Koperasi, semula dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 berkurang Rp500.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp1.403.500.000,00 bertambah Rp30.000.000,00 menjadi Rp1.433.500.000,00 atau 0,059% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat pula kebijakan penurunan dan kenaikan alokasi Belanja Bantuan Sosial, yaitu:
- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan kepada Individu, semula dianggarkan sebesar Rp342.500.000,00 berkurang Rp18.500.000,00 menjadi Rp324.000.000,00; dan
 - 2) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan kepada Keluarga, semula dianggarkan sebesar Rp562.500.000,00 bertambah Rp55.000.000,00 menjadi Rp617.500.000,00.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Blora disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 96,71% atau terdapat sisa anggaran Rp2.305.106.053,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,71% atau terdapat sisa anggaran Rp61.431.000,00.
- d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023.

7. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp323.293.549.430,00 bertambah Rp44.645.077.800,00 menjadi Rp367.938.627.230,00 atau secara proporsi sebesar 15,24% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, meningkat sebesar 1,06% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 14,18%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Blora sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

8. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan

- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, semula dianggarkan sebesar Rp23.282.423.000,00 bertambah Rp3.350.727.000,00 menjadi Rp26.633.150.000,00;
- 2) Belanja Modal Bangunan Gedung pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, semula dianggarkan sebesar Rp24.770.000.000,00 bertambah Rp3.040.110.510,00 menjadi Rp27.810.110.510,00; dan
- 3) Belanja Modal Bangunan Gedung pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, semula dianggarkan sebesar Rp3.009.500.000,00 bertambah Rp2.370.000.000,00 menjadi Rp5.379.500.000,00.

b. Dinas Kesehatan

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.

c. Rumah Sakit Umum Dr R Soeprapto Cepu

Belanja Modal Bangunan Gedung pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, semula dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp1.200.000.000,00 menjadi Rp5.200.000.000,00.

d. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Belanja Modal Bangunan Gedung pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.

e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, semula dianggarkan sebesar Rp76.129.365.500,00 bertambah Rp14.121.558.000,00 menjadi Rp90.250.923.500,00; dan
- 2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan, semula dianggarkan sebesar Rp8.700.000.000,00 bertambah Rp5.937.242.000,00 menjadi Rp14.637.242.000,00; dan

- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, semula dianggarkan sebesar Rp2.300.000.000,00 bertambah Rp7.572.500.000,00 menjadi Rp9.872.500.000,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Blora, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

9. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp10.000.000.000,00 berkurang Rp8.000.000.000,00 menjadi Rp2.000.000.000,00 atau menurun 80,00%. Pemerintah Kabupaten Blora dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Blora harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir G.57.c. Lampiran Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Blora telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp11.177.000.000,00 berkurang Rp700.000.000,00 menjadi Rp10.477.000.000,00 atau secara proporsi sebesar 0,43% dari total belanja daerah. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.
11. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan sebagai berikut:

SILPA BLUD	Rp	41.573.931.172,00	
Pendapatan BLUD	Rp	162.606.000.000,00	+
	Rp	204.179.931.172,00	
Belanja BLUD	Rp	205.053.545.069,00	-
	Rp	(873.613.897,00)	

Mencermati data tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora telah mengalokasikan keseluruhan secara langsung pendapatan BLUD di Dinas Kesehatan melalui pembiayaan belanja operasional RSUD dan Puskesmas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah. Untuk itu kami mengapresiasi dan kedepan Pemerintah Kabupaten Blora harus konsisten dalam mengalokasikan pendapatan dan belanja pada BLUD di Kota Pekalongan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
13. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Blora, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, meliputi:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora semula dianggarkan Rp150.000.000,00 bertambah Rp3.716.690.800,00 menjadi Rp3.866.690.800,00; dan
 - b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, semula Rp300.000.000,00 bertambah Rp13.662.082.800,00 menjadi Rp13.962.082.800,00.

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa:

- a. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024

dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu;

- b. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang harus disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blora harus memperhatikan pula ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, khususnya berkenaan dengan sanksi tidak diberikannya nomor register sehingga Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak akan berlaku, manakala Pemerintah Kabupaten Blora tidak menindaklanjuti amanat penyediaan Dana Hibah Pilkada sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tersebut.

14. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp100.000.000.000,00 bertambah Rp45.955.777.733,00 menjadi Rp145.955.777.733,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp145.955.777.733,00. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Blora harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

V. LAIN-LAIN

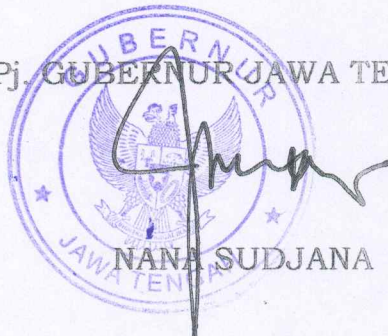
1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Kabupaten Grobogan tentang Perubahan APBD TA 2023 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jateng.
 - 2) Dasar Hukum mengingat:
 - a. angka 5 agar disempurnakan menjadi:
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - b. agar ditambahkan 1 (satu) dasar hukum baru sebagai berikut:

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
2. Hasil Pencermatan Rancangan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - 1) Dasar Hukum mengingat:
 - a. angka 5 agar disempurnakan menjadi:
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - b. agar ditambahkan 1 (satu) dasar hukum baru sebagai berikut:

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
3. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023; dan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.
5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA